

## MEMBACA GERAK POLITIK MUHAMMADIYAH DAN NU PASCA REFORMASI

Oleh : Saud El Hujjaj\*

“Perkembangan kesadaran keagamaan umat ditentukan oleh mobilitas sosial, tidak oleh kekuasaan politik. Perkembangan kesadaran keagamaan terus melaju dengan syarat ada mobilitas sosial, tidak dengan syarat ada kekuasaan.”

*(Diambil dari Prof. Dr. Kuntowijoyo, dalam salah satu kesimpulan pidato pengukuban Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2001)*

ORGANISASI KEMASYARAKATAN sosial terbesar di Indonesia, sampai hari ini yang tetap berdiri tegak dan kokoh, dengan basis massa yang cukup besar hanya ada dua, yaitu Muhammadiyah dan NU. Kedua Ormas ini “saling bersaing” dalam banyak hal: agama, budaya, pendidikan, amal usaha dan yang paling penting adalah persaingan dalam hal politik. Kedua organisasi ini sama-sama memiliki pengalaman politik yang membanggakan dan juga sangat pahit. Pada era reformasi, Muhammadiyah dan NU sama-sama memiliki kepentingan dengan partai politik, di mana NU dengan segala macam penafsirannya

memiliki hubungan kultural dan basis pemilih yang sama dengan PKB. Begitu juga dengan Muhammadiyah, mayoritas pemilih warga Muhammadiyah adalah PAN meskipun ada beberapa golongan yang tidak sama besar memilih partai lain di luar PAN.

Terlepas dari beragam penafsiran hubungan politik antara kedua organisasi tersebut dengan identitas partai politik yang ada, sesungguhnya ada persoalan menarik yang perlu dicermati mengapa geliat partisipasi politik kedua organisasi ini cukup besar di era reformasi. Lebih dari itu, dalam konteks perubahan UU Pemilu dan RUU PPWP secara langsung pada Pemilu 2004 mendatang, dapat dipastikan bahwa mobilisasi dukungan, partisipasi dan penempatan kepentingan kedua ormas ini akan semakin meningkat. Setidaknya ada tiga alasan mengapa mobilisasi, partisipasi dan penempatan kepentingan kedua organisasi ini akan semakin meningkat. *Pertama*, melemahnya kekuatan negara sejak runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Wajah multi

---

\* *Saud El Hujjaj* adalah Ketua Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Periode 2002 – 2005.

partai politik dalam pemilu 1999 adalah bagian dari euphoria pasca rezim otoriter Orde Baru. Muhammadiyah dan NU sama-sama tampil dalam wajah politik yang memiliki keterlibatan dalam proses, dan bahkan sulit untuk dipisahkan dari salah satu identitas partai politik. Dalam tubuh elit NU misalnya, pernah terlontar perdebatan pelik antara PKB dan NU yang dimetaforkan ke dalam istilah PKB adalah telur NU dan yang lain adalah *tainya*. Sedanglan dalam Tanwir Muhammadiyah di Semarang, mengamanatkan Amien Rais supaya melakukan ijtihad politik yang akhirnya menghasilkan PAN.

*Kedua*, saling merasa memiliki basis massa yang besar. Setiap kali terdapat momen politik yang menuntut melibatkan dukungan massa, tidak jarang kedua ormas ini memanfaatkan ribuan dan bahkan jutaan massa dalam rangka *show of forces* baik melalui ritus tradisi agama seperti istighosah, tabligh akbar, maupun demonstrasi. Selain hal itu, kedua ormas ini juga sering mengklaim jumlah puluhan juta massa yang ada di belakang gerakannya. Atas dasar ini, maka organisasi ini sangat percaya diri dalam melakukan mobilisasi politik secara vertical maupun horizontal. Apalagi dalam konteks kebebasan seperti saat ini.

*Ketiga*, sama-sama menganggap penting representasi kepentingan kelompok dalam lingkaran kekuasaan negara. Kecenderungan gerakan agama

dalam Islam terbagi secara ekstrim pada dua pendulum. Pertama, pendulum yang menganggap tidak penting representasi kelompok ke dalam wilayah kekuasaan negara dan pendulum kedua sebaliknya. Pendekatan politik masing-masing kelompok dalam menempatkan representasi kekuasaan cukup variatif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan politik yang di mainkan oleh representasi Muhammadiyah dan NU selama ini ada dua macam, pertama adalah pendekatan politik melalui garis dukungan terhadap salah satu partai sebagai wadah saluran politik seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. *Kedua*, pendekatan politik yang mengambil jarak langsung dengan salah satu partai politik seperti pada masa Post-Orde Baru dan Pasca Reformasi. Untuk pendekatan pertama sudah ditinggalkan lama oleh kedua Ormas ini, akan tetapi pendekatan kedua pun juga telah mulai mengalami transformasi ke arah yang belum pasti bentuknya.

Untuk sementara, dalam konteks pendekatan politik, kategori mengambil jarak dengan partai politik (non partai) dapat kita eksplorasi ke dalam tiga model yang selanjutnya dijelaskan secara sederhana di bawah ini, yaitu, model pendekatan politik arus bawah (*grass root politics*), model pendekatan politik alokasi (*politics of allocation*) dan model pendekatan politik dakwah (*wisdom politics*).

### Pendekatan Politik

Konsolidasi dan mobilisasi dukungan kedua kelompok ini dilakukan dengan beragam cara dan saluran politik yang berbeda-beda media dan kultur politiknya. Di kalangan NU konsolidasi politik sering dilakukan melalui acara-acara populer relegius seperti istighosah akbar, pertemuan ulama khos, dan lain-lain, yang sedikit agak transparan. Sedangkan di Muhammadiyah, upaya konsolidasi lebih nampak sembunyi-sembunyi di balik acara rutinitas organisasi seperti Sidang Tanwir, tabligh akbar, dan lain-lain. Begitu juga dengan kultur politik masing-masing ormas ini. Di kalangan NU kultur politik lebih bersifat patron klientalisme pada kyai, sedang di kaum Muhammadiyah lebih menekankan pada kebebasan dan rasionalisasi. Meskipun demikian, kedua kultur ini sama-sama memperkuat patronase organisasi keagamaan masing-masing dengan model dan gaya yang berbeda-beda di tingkat akar rumput.

Terdapat banyak perubahan mekanisme konsolidasi, pendekatan dan komunikasi politik dalam dua organisasi ini jika dibandingkan dari pengalaman mereka selama terlibat dalam perpolitikan di Indonesia. Secara garis besar terdapat tiga pendekatan yang pernah dilakukan kedua ormas ini yang nantinya akan mempengaruhi pola perubahan mekanisme konsolidasi dan komunikasi politik. Pendekatan politik tersebut

adalah *pertama*, pendekatan politik arus bawah atau *grass-root politics*. Pendekatan ini pertama kali diintrodusir secara mendalam oleh AS. Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* (LP3ES, 1999) di mana dalam buku tersebut secara khusus Hikam membicarakan politik arus bawah dan *civil society* di Indonesia. A.S. Hikam menggunakan istilah politik arus bawah di sini untuk menunjukkan praktek dan diskursus masyarakat kelas bawah mulai dari para petani dan buruh di wilayah pedesaan sampai buruh industri, pedagang kecil, dan mereka yang bekerja di tempat yang disebut sektor informal di perkotaan (Hikam; 114).

A.S. Hikam melihat bahwa strategi politik arus bawah sangat memiliki dampak yang cukup kuat jika mereka menemukan bentuknya. Pada masa Orde Lama Hikam menggambarkan kesuksesan artikulasi politik arus bawah disebabkan oleh terbukanya dua saluran politik yang penting, yakni partai politik dan serikat buruh independen. Meskipun demikian, sejatinya politik arus bawah belum menemukan bentuknya yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, Hikam dalam gagasannya ini menempatkan strategi pemberdayaan politik arus bawah yang kurang diarahkan pada mobilisasi politik langsung, yang mengikuti model revolusioner pada masa demokrasi liberal. Akan tetapi lebih

diarahkan pada revitalisasi kesadaran diri dan kemandirian politik masyarakat yang merupakan ciri dari model pendekatan *civil society*.

Dengan demikian, politik arus bawah tidak dipahami sebagaimana paradigma Marxisme, tetapi berdasarkan visi politik yang dalam dan evolusioner yang memberikan perhatian pada soal-soal seperti agen, refleksi diri, dan kemampuan komunikasi, yang telosnya adalah untuk memperkuat kemandirian politik anggota masyarakat (Hikam; 124). Dengan menguatnya pemberdayaan politik arus bawah mengikuti model ini maka akan muncul dorongan transformasi sosial masyarakat yang kuat, yang tidak bergantung pada suhu politik negara. Pada saat yang sama, di sinilah akan ditemukan *civil society* dan demokratisasi.

Dalam konteks ini, sesungguhnya Hikam “berambisi” untuk menarik gerbong politik NU ke arah pemberdayaan politik arus bawah pada masa Orba yang lalu dengan membangun kultur politik baru, sebagaimana telah ditampilkan dengan sangat cantik oleh Gus Dur. Hasil yang didapatkan sungguh mengejutkan, dan kita dapat melihat bagaimana tumbuh dan berkembangnya kantong-kantong intelektual muda NU seperti LKIS, LAKPESDAM NU, ISIS, P3M, eLSAD, dan lain-lain yang menyebar ke berbagai daerah sebagai

bentuk dari penggambaran kemandirian *civil society*.

Kedua, pendekatan politik alokasi (*politics of allocation*). Gagasan ini berawal dari obsesi Din Syamsuddin dalam memberikan kerangka teoritik atas perilaku politik Islam modernis pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya di saat Orde Baru menandakan sikap akomodasionis terhadap Islam. Politik alokasi yang diteorisasikan oleh Din Syamsuddin, sesungguhnya, ia mencoba untuk merepolitisasi Islam pasca depolitisasi Islam atau pembatasan untuk tidak berpolitik praktis oleh Orde Baru. Repolitisasi Islam model Din Syamsuddin inilah yang kemudian ia sebut sebagai politik alokasi. Adapun target dari politik alokasi adalah upaya untuk melakukan alokasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan politik sebagai bentuk dari representasi kepentingan umat Islam. Pendek kata, apa yang diupayakan Din Syamsuddin sebenarnya adalah usaha pendekatan politik melalui jalur struktural, meskipun Din Syamsuddin sendiri tetap menekankan gerakan kultural dalam arti tidak terjebak ke dalam wilayah kegiatan politik praktis (Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 173-174).

Beberapa kesuksesan pendekatan politik alokasi yang digambarkan oleh Din Syamsuddin di antaranya adalah pembatalan RUU Perkawinan tahun

1973, kesuksesan pengesahan RUU Pendidikan Nasional tahun 1988 dan peradilan agama yang merupakan *par excellent* dari politik alokasi pada waktu itu.

*Ketiga*, pendekatan politik dakwah atau politik *mufaraqah* (memisahkan diri) dari urusan politik praktis dengan mengambil peran yang lebih besar pada pengembangan sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berkeadaban (*civilized society*). Pemaknaan awal atas konsep politik dakwah ini digunakan oleh Amien Rais untuk merekonstruksi sikap traumatik umat Islam terhadap politik. Amien Rais mencoba mendefinisikan kembali politik yang dipahami masyarakat Islam umumnya sebagai keterlibatan dalam partai politik ke arah politik yang bermakna dakwah. "Umat Islam boleh tidak berpolitik praktis akan tetapi umat Islam tidak boleh buta politik atau apolitik", inilah bahasa yang sering kita dengar dari Amien Rais waktu itu. Selanjutnya politik dakwah ini dikembangkan Amien Rais dalam konsep yang sangat populer di kalangan Muhammadiyah dengan istilah *high politics* yang dikontraskan dengan *low politics* (Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1995).

Di dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Bali, pendekatan politik dakwah ini kembali ditegaskan oleh Syafii Maarif sebagai bentuk untuk menyatukan kekuatan umat yang terfragmentasi ke dalam

ragam partai politik. Untuk membedakan perbedaan prinsipil antara politik kepartaian dan politik dakwah, Buya Syafii Maarif berfilosofi sebagai berikut: "Politik berbicara: Si A adalah kawan dan si B adalah lawan". Dakwah mengoreksi: Si A adalah kawan dan si B adalah sahabat. Politik cenderung berpecah dan memecah, dakwah merangkul dan mempersatukannya."

### Ijtihad Politik

Terbukanya ruang politik pasca Orde Baru, diakui atau tidak, telah membawa dampak pada pergeseran strategi pendekatan dan saluran politik Muhammadiyah dan NU. Pergeseran inilah yang sesungguhnya justru menciptakan tantangan-tantangan baru bagi politik Muhammadiyah dan NU, yang secara langsung atau tidak langsung akan memaksa kedua ormas ini untuk melakukan ijtihad dan pembaruan-pembaruan visi politik. Karena dengan ijtihad dan pembaruan visi politik, kedua ormas ini akan dapat koeksisten dan tidak akan tertinggal oleh proses politik yang berlangsung.

Pergeseran politik Muhammadiyah dan NU ini setidaknya dapat dilihat dalam tiga level politik, di mana dalam beberapa hal terdapat saling kemiripan dan dalam hal yang lain cukup berbeda. *Pertama*, level ideologi politik. Dalam konteks ini, ideologi politik yang dimaksud adalah keyakinan, praktek dan cita-cita politik

yang diperankan oleh Muhammadiyah dan NU. Pada masa lalu (Pemilu 1955 sampai masa demokrasi terpimpin), kedua Ormas ini tersekat dalam politik aliran, yang sangat menekankan pada dimensi emosional, mobilitas sosial dalam rangka meraih dukungan massa yang besar dan lebih dari itu, menciptakan kesan praktek politik antara “opportunistis” dan “tidak opportunistis” atau berpegang pada prinsip moral dan perjuangan Islam. Peristiwa puncak dari asumsi ini oleh banyak orang disebabkan karena sikap penerimaan konsep Nasakom oleh Partai NU dan penolakannya terhadap Masyumi yang sekaligus merepresentasikan politik Muhammadiyah.

Pada masa Orba, kebijakan politik yang dimainkan oleh rezim Soeharto dengan menutup ideologi dan saluran politik umat pada umumnya dan Islam khususnya membawa pada perbedaan sikap dan praktek politik keduanya. Dalam konteks ideologi politik, NU nampak sangat terbuka dan lebih mudah menerima ideologi tunggal Pancasila dibandingkan dengan Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, mengalami tarik-ulur dan rasionalisasi yang cukup panjang terhadap penerimaan konsep ideologi tunggal Pancasila tersebut.

Lebih jelas lagi, perubahan ideologi politik tersebut nampak pada saat pasca Orde Baru, yang oleh Greg Barton dikategorikan sebagai wujud dari

“pluralisme-demokratik”. Apabila hal ini benar, maka konsekwensi dari pilihan ini, tentunya, tidak lagi mengedepankan model politik aliran sebagaimana zaman Orla. Dengan kata lain, proses rasionalitas politik, pluralisme, dan demokrasi menjadi komitmen dan aturan main yang dipandang perlu untuk dilembagakan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Meskipun demikian, asumsi ini masih belum teruji sebelum melewati beberapa tahap proses menuju pelembagaan pluralisme demokratik tersebut.

Di tingkat keyakinan dan wacana, ideologi pluralisme demokratik ini memang cukup merepresentasikan dari proses pencarian yang saling memperkuat antara Islam dan demokrasi. Tetapi pada proses pelembagaan, masih sedikit ideologi ini mampu diserap oleh institusi dan kultur NU dan Muhammadiyah yang mampu mempraktekkan dan mentransformasikan demokrasi di komunitas Muslim. Untuk itu, agenda terbesar dari transformasi politik Muhammadiyah dan NU adalah melembagakan keyakinan dan cita-cita politik keagamaan pluralisme demokratik ini, yang tentunya, merupakan warna baru dari peta politik Muslim di dunia, yang sarat dengan muatan pluralisme, demokrasi, rasionalisasi yang berdasar pada nilai-nilai religius.

*Kedua*, pendekatan politik. Pendekatan politik dipahami sebagai

strategi artikulasi dari cita-cita dan keyakinan politik dalam rangka mencapai tujuan politik. Kecenderungan pendekatan politik yang dilakukan oleh gerakan Islam ini terbagi secara ekstrim pada tiga bentuk. *Pertama*, adalah menjadi partai politik seperti yang pernah dilakukan oleh NU pada saat keluar dari Masyumi tahun 1952. *Kedua*, adalah pendekatan politik dengan mengambil dukungan terhadap salah satu partai sebagai wadah saluran politik seperti yang terjadi pada Muhammadiyah di masa-masa Orde Lama dan awal Orde Baru. *Ketiga*, pendekatan politik yang mengambil jarak langsung dari dan tidak terlibat dalam mendukung salah satu partai politik. Muhammadiyah mengambil sikap ini sejak tahun 1971 yang kemudian disebut dengan khittah 1971 di Makassar. Sedangkan NU mengambil sikap yang sama sejak kepemimpinan Gus Dur tahun 1984, yang dikenal dengan kembali ke khittah 1926.

Era Reformasi telah membuka ranah baru bagi pendekatan politik Muhammadiyah dan NU. Meskipun pada awalnya dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang, Muhammadiyah mengamanatkan Amien Rais untuk melakukan ijtihad politik, akan tetapi Muhammadiyah tetap berpegang pada pendekatan politik jaga jarak dengan partai politik manapun, termasuk PAN. Hal ini agak berbeda dengan NU, di mana NU masih terlihat dalam

permainan politik belah bambu terhadap salah satu partai politik yang berbasis kaum nahdliyin tersebut. Yaitu NU masih terlihat menganakemaskan PKB dari pada partai PNU maupun PKU yang masing-masing berbasis kaum nahdliyin.

Pendekatan politik yang terakhir, yaitu pendekatan politik ambil jarak dengan partai politik, yang pada akhirnya terpolarisasi dalam tiga model sebagaimana dijelaskan di muka, yaitu pendekatan politik arus bawah (*grass root politics*), model pendekatan politik alokasi (*politics of allocation*) dan model pendekatan politik dakwah (*wisdom politics*). Pendekatan politik arus bawah lebih menekankan pada aspek transformasi kesadaran dan pemberdayaan politik akar rumput dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak politik sebagai warga negara. Usaha dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kesadaran independensi, melawan kecenderungan hegemoni kekuasaan dengan menciptakan solidaritas sosial dan membebaskan keterbelakangan, kebodohan dan ketertindasan dalam rangka menegakkan keadilan sosial sebagai bagian dari visi Islam.

Adapun pendekatan politik alokasi menekankan pada perjuangan struktural Islam guna mempengaruhi dan memasukkan ajaran Islam dalam bingkai kekuasaan. Asumsi dasar dari perjuangan ini terletak pada logika bahwa hukum Islam tidak akan tegak tanpa ditegakkan

oleh kekuasaan yang memiliki otoritas pemaksa bagi anggota masyarakat. Otoritas pemaksa yang berdaulat dan memiliki legitimasi itu adalah negara. Sedangkan politik dakwah, sesungguhnya lebih menempatkan etika politik sebagai bagian dari aturan main para aktor politik dalam melaksanakan amanat dan memperjuangkan aspirasi umat berdasarkan nilai-nilai iman dan religius.

*Ketiga*, level saluran politik. Saluran politik di sini dimaksudkan sebagai usaha penyampaian aspirasi politik secara formal melalui partai politik. Pada masa zaman Orla, aspirasi politik Muhammadiyah disalurkan secara resmi kepada Partai Masyumi, sedangkan NU disalurkan ke Partai NU. Pada masa Orba, saluran politik kedua Ormas ini berubah-ubah sesuai dengan kebijakan negara Orba. Hanya saja Muhammadiyah lebih dahulu memutuskan bebas menyalurkan aspirasi politik ke partai manapun, lantaran tidak mempunyai ikatan secara formal dengan salah satu partai politik. Sedangkan pada saat pasca reformasi, saluran politik kedua Ormas ini diartikulasikan secara berbeda. Muhammadiyah telah menegaskan diri tidak terlibat pada, dan berhubungan dengan salah satu partai politik manapun. Sedangkan NU masih berkuat pada persoalan PKB sebagai partai sah NU atau tidak. Persoalan saluran politik inilah yang sesungguhnya menentukan kesiapan kedua Ormas ini

dalam membangun kesadaran politik atau justru sebaliknya.

### **Konteks Pemilu 2004: Mobilitas Politik atau Mobilitas Sosial?**

Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2004 mendatang, dalam banyak hal, membawa beberapa perubahan sistem politik yang sedikit banyak akan mendukung proses keterbukaan aturan main demokrasi. Apabila kita identifikasi, terdapat lima isu strategis menyangkut perubahan sistem politik pada pemilu 2004. *Pertama*, pemilihan yang dilaksanakan tiga kali, yaitu memilih legislatif (DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota), memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan memilih Presiden dan Wakil presiden secara langsung yang diatur dalam undang-undang tersendiri. *Kedua*, sistem pemilihan yang menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Yaitu dengan memilih tanda gambar partai dan calon. *Ketiga*, penyelenggaraan Pemilu oleh KPU. *Keempat*, munculnya isu dan aturan yang membicarakan secara khusus tentang dapatnya perempuan dicalonkan di jabatan politik sekurang-kurangnya 30%. *Kelima*, persyaratan peserta pemilu yang lebih ketat.

Dengan perubahan sistem politik tersebut akan menciptakan konsekuensi yang cukup signifikan bagi artikulasi kelompok-kelompok politik yang ada. Kelompok-kelompok politik tersebut

terdiri dari partai politik, *interest group*, dan *pressure group*. Konsekwensi yang harus diterima oleh kelompok-kelompok politik dari perubahan sistem politik ini di antaranya adalah: 1) masyarakat akan mulai menuntut kerja partai politik, *interest group* dan *pressure group* berdasarkan fungsinya masing-masing. Jika selama ini yang berfungsi adalah kelompok partai politik, maka dengan perubahan sistem politik tersebut memungkinkan masyarakat akan membentuk asosiasi sosial sebagai *interest group* dan *pressure group* dalam partisipasi politik. Bukan lagi partisipasi yang didasarkan atas kedekatan aliran politik, akan tetapi lebih karena kepentingan politik yang sama. 2) Dengan banyaknya partai politik sebagai peserta pemilu, memungkinkan masyarakat untuk semakin bebas memilih partai politik berdasarkan kepentingan masing-masing. 3) Organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU sudah merasa tidak strategis lagi untuk membangun kekuatan gerakannya berdasarkan patronase dari, dan memberikan saluran politiknya pada salah satu partai politik. Artinya, organisasi sosial keagamaan ini mulai berpikir untuk menjaga irama mobilitas sosial yang lebih kongkrit sebagai basis gerakannya dari pada menyokong mobilitas politik yang banyak tidak memberikan kepastian. Walaupun demikian, Muhammadiyah dan NU masih belum bisa secara kultural

melepaskan hubungan khusus dengan salah satu partai politik. Hal ini sangat nampak terutama pada hubungan antara NU dan PKB, yang sering kali saling melibatkan diri untuk menyelesaikan konflik di salah satu tubuh dua organ yang berbeda secara fungsional-kelembagaan ini.

Kenyataannya memang perubahan sistem yang ada tidak serta merta akan segera diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan politik Muhammadiyah dan NU yang menempatkan diri sebagai gerakan sosial dan bukan lagi memiliki hubungan khusus terhadap salah satu partai politik merupakan langkah maju bagi pengembangan kehidupan politik Indonesia ke depan. Dengan demikian, mobilisasi politik yang bersifat irrasional dapat diminimalisir dengan mengedepankan pada proses mobilitas sosial. Pengembangan mobilitas sosial masyarakat dapat diarahkan pada upaya pemberdayaan akar rumput melalui program-program pengembangan ekonomi dan pembaruan sosial. Sehingga dinamika artikulasi politik yang berkembang dalam gerakan Muhammadiyah dan NU dapat dilihat dari sisi lain di luar jalur partai politik yang selama ini cukup dominan. Yaitu melalui politik pemberdayaan akar rumput, yang mampu menggerakkan mobilitas sosial masyarakat ke arah kehidupan yang demokratis, toleran, dan non kekerasan.

Lebih dari itu, dalam konteks politik Indonesia kekinian, artikulasi politik yang menempatkan pada pemberdayaan masyarakat akan memiliki investasi bagi pengembangan demokrasi ke depan. Muhammadiyah dan NU yang memiliki basis massa yang cukup besar akan sangat menentukan perannya apabila secara serius mampu memainkan kekuatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa alasan yang mendukung argumen ini. *Pertama*, masyarakat tidak terjebak dalam proses perjuangan politik semata yang bersifat struktural, melainkan akan lebih

menempatkan pada proses pengembangan mobilitas sosial. *Kedua*, dengan membangun mobilitas sosial akan tercipta modal sosial (*social capital*) yang mampu mengintegrasikan masyarakat untuk percaya pada *social trust*, pluralisme, dan demokrasi. *Ketiga*, mendorong terciptanya kesadaran kontrol masyarakat pada negara, sehingga akan berpengaruh pada usaha mewujudkan *clean governance* dan *good government*. Peran-peran yang demikian lah yang sesungguhnya lebih diperlukan dari Muhammadiyah dan NU dalam membangun kehidupan politik Indonesia ke depan.

